

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004) hal 2
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: TWC.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 17.
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.Hlm ix
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Djohermansyah Djohan, Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal, Cet I (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), h.52.
- Eko Prasajo. Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Structural. Depok: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 196.
- Hanafi Nurcholis, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah, PT.Grasindo, Jakarta 2005,hal 100
- HAW. Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Cet 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 18.
- Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. Masa depan Hukum Progresif. Yogjakarta: Thafamedia
- Tim Pedoman Buku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Buku Pedoman Fakultas Hukum Edisi Revisi 2011*, Semarang, Universitas diponegoro, 2011, hlm. 105-106.

Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*,

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.205

2. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia selaku ketua dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam nomor 07 tahun 2016 tentang kebijakan umum pemasukan barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam
- d. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam.

3. Makalah dan Jurnal

Anjasmara galuh, 2019, "REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM (Studi Kasus Perubahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2016 - 2018)". Skripsi, FISIP, Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jurnal Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. I, No.1, September 1999.

Journal of Business Administration/Muhammad Zaenuddin,dkk/dualisme kelembagaan antara pemerintah kota dan badan pengusaha batam serta dampaknya terhadap kinerja perekonomian di kota batam/ Vol 1, No 2, September 2017, hlm. 230

Pemerintah-kota-batam dalam Solusi mengatasi problematika *Free Trade Zone* (FTZ) Batam dengan tranformasi Batam menjadi kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, (www.parlemen.net, diakses pada 12 Desember 2019).

SONATA, DONA (2017) *PERAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KOTA BATAM*. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

BPS Kota Batam, Kota Batam dalam Angka Tahun 2019

4. Web

<https://batam.tribunnews.com/2020/01/06/lakukan-demo-tunggal-jadi-rajagukguk-kami-minta-kepala-bp-batam-mundur>

<https://bpbatam.go.id>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1466-2016.pdf>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24690/t/Penunjukkan+Wali+Kota+Batam+Sebagai+Ex+Officio+Kepala+BP+Batam+Berpotensi+Maladminist rasi>

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/542/jbptunikompp-gdl-rianwahman-27091-7-unikom_r-i.pdf

<https://insight.kontan.co.id/news/kewenangan-pengelolaan-dan-pengembangan-batam-beralih-ke-pemerintah-kota>

<https://jagad.id/peta-kota-batam-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/>

<https://money.kompas.com/read/2019/05/08/163200826/penetapan-wali-kota-batam-sebagai-ex-officio-kepala-bp-batam-sarat?page=all>

<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-hentikan-rencana-pengangkatan-ex-offico-kepala-batam>

https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/41393/5/Bab%20IV_2004esu.pdf

https://tanjungpinang.bpk.go.id/?page_id=1947

<https://iteba.ac.id/kota-batam/>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/24/12/2018/atur-hubungan-pemkot-bp-batam-pemerintah-didorong-terbitkan-pp/>

<http://www.pu.go.id/isustrategis/view/7>, diakses tanggal 11 Agustus 2019